

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====
Tahun Sidang : 2006 - 2007
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 25 September 2006
Pukul : 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Menhan dan Panglima TNI
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir Anggota : 45 orang dari 50 Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menteri Pertahanan RI, Sdr. Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA
Panglima TNI, Sdr. Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP
beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

A. Menteri Pertahanan

1. Komisi I DPR RI minta agar Menhan memperjuangkan perundingan Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Pemerintah Singapura dengan tetap menjaga dan mengakomodasi kepentingan nasional semaksimal mungkin dan agar pemerintah menggunakan negosiasi tentang DCA sebagai posisi tawar untuk memperlancar dan mempercepat perundingan tentang ET (Extradition Treaty) dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia

2. Sejalan dengan dukungan Komisi I DPR RI terhadap pengiriman pasukan TNI dalam kerangka UNIFIL ke Libanon, dan memperhatikan langkah pemerintah yang terutama karena alasan keterbatasan waktu dan kompatibilitas telah menempuh cara penunjukan langsung G to G dalam pengadaan 32 Panser VAB, Komisi I menerima proses pengadaan Panser tersebut dengan catatan tetap memenuhi ketentuan prosedur dan peraturan yang berlaku, prinsip transparansi, akuntabilitas dan menekan harga serendah mungkin, serta dengan memperoleh kualitas kendaraan tempur yang teruji dan dapat digunakan kembali dalam tugas TNI di Indonesia.
3. Menyikapi persoalan penyelewengan dana prajurit yang berlarut-larut yang telah merugikan keuangan negara, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah agar mempercepat proses hukum kasus tersebut.
4. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pengaduan ke DPR RI oleh kalangan purnawirawan TNI mengenai berbagai masalah tanah dan penghunian rumah, Komisi I DPR RI minta Menhan dan Panglima TNI agar menangani permasalahan tersebut berdasarkan prosedur, ketentuan, dan peraturan yang berlaku serta dengan pendekatan dialog dan memperhatikan kondisi hidup para purnawirawan tersebut. Dalam hubungan ini, untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, Komisi I DPR RI senantiasa memberikan saran dan masukan untuk mencari solusi sebaik-baiknya atas masalah tersebut.

B. Panglima TNI

1. Komisi I DPR RI minta Panglima TNI agar melanjutkan dan mempercepat proses pengusutan kasus alm. Koesmayadi sampai pada proses hukum yang tuntas serta menginformasikan kepada masyarakat perkembangan tahapan-tahapan pengusutan secara berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
2. Komisi I DPR RI minta Panglima TNI agar rotasi pasukan TNI di daerah penugasan disesuaikan dengan kondisi daerah, dukungan anggaran dan psikologi pasukan di lapangan, dengan memperhatikan batas wajar bagi rotasi, serta juga memberikan masa transisi yang cukup bagi pasukan yang akan meninggalkan dan pasukan pengganti untuk memaksimalkan peran dan tugas pasukan pengganti yang baru di daerah operasi.
3. Komisi I DPR RI mendukung pembangunan jumlah dan kuantitas pos perbatasan yang memadai termasuk di daerah perbatasan dan pulau terdepan guna mengoptimalkan pengamanan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, dan agar pembangunan pos perbatasan sebagai basis pertahanan diprioritaskan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA

Permadi :

Terima kasih, mohon kesimpulan ditambah agar Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI sepakat untuk menyelesaikan kasus-kasus pengaduan purnawirawan dengan menggunakan DPR sebagai fasilitator. Terima kasih.

Yuddy Chrisnandi :

Terima kasih Pimpinan, yang saya hormati Menhan, Panglima TNI, para Kepala Staf dan jajarannya, ada 2 hal yang pertama mengenai kesimpulan nomor 1 mengenai panser dan ke-2 masalah senjata.

Yang terkait dengan masalah panser, sejauh rapat Komisi I DPR RI yang kita ikuti bersama dari pagi sampai dengan hari ini yang jelas dengan clear memberikan dukungan persetujuannya terhadap pembelian panser yang direncanakan oleh Pemerintah, saya hanya mendengarkan 1 orang dan lainnya memberikan pandangan-pandangan, sementara pandangan saya sudah dikemukakan dengan kesimpulan menolak, oleh karena itu dengan kesimpulan yang dibacakan oleh Pimpinan, argumentasi G to G tadi, belum bisa meyakinkan kami bahwa itu akan bisa dilakukan mengingat argumentasi-argumentasi yang disampaikan, lalu kemudian juga masalah-masalah darurat lalu kemudian prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dsb ini juga belum bisa kita buktikan mengingat sampai dengan saat ini kita belum memiliki informasi yang cukup apakah sebenarnya kita memiliki panser-panser yang layak digunakan juga untuk dimedan sana, kemudian yang kedua terkait dengan masalah senjata pada prinsipnya saya setuju dengan kesimpulan tsb hanya saja pengusutan yang laporannya disampaikan secara berkala ini memakan waktu berapa lama, menurut pendapat saya harus ada batas waktu sebagaimana kita memberikan pada 1 bulan utk menyampaikan laporan investigasi internal. Saya berpandangan bahwa proses penyidikan yang sudah semakin mengerucut kepada 15 orang yang disampaikan walaupun nama-namanya tidak disebutkan tadi seyogyanya bisa diberikan dalam batas waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun ini, sehingga kalau dikatakan secara berkala menyampaikan hasil progresnya hampir setiap bulan ada hal-hal baru yang bisa disampaikan kepada publik dan pada akhir desember 2006 ini masalah senjata ini sudah tuntas penyelidikannya dan sekiranya memang perlu dibawa pada proses tindak lanjut hukum yang lebih jauh ini sudah ada satu kejelasan.

Ketua :

Baik terima kasih, khusus pak yudy, pertama mengenai panser, saya kira konsep saudara yudy tidak sepenuhnya benar, dari seluruh pembicaraan yang saya ikuti dan saya catat disini yang berbicara, maksudnya dapat menerima proses dengan berbagai argumentasi tadi, proses penunjukan langsung ini, saya lihat lebih dari 3 orang, saya bisa sebut saja upama khusus pak afifudin, pak suparlan, pak permadi, pak sembiring, pak fani habibie, saudara boy juga, jadi akhirnya yang tidak menerima ya mungkin sdr. Yudy sendiri saya kira kalau gitu. Dengan sudah tentu ada argumentasi-argumentasi setelah mencatat. Jadi saya juga mencoba merangkumkan sehingga antara yang dapat menerima dengan argumentasi-argumentasi G to G, keterbatasan waktu oleh karena itu proses penunjukan langsung dengan yang terus konsern terhadap soal akuntabilitas malah minta uang negara bisa dihemat, menekan serendah mungkin maka disini juga tetap dengan catatan yaitu tadi prinsip transparansi, memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, akuntabel dan menekan harga serendah mungkin serta kualitas teruji sehingga betul-betul dapat dipakai waktu digunakan disini.

Kedua kalau soal kasus Koesmayadi, disini sebenarnya sama dengan yang dimaksudkan oleh sdr. Yudy, yaitu cuma kalimatnya berbeda yaitu disini melanjutkan dan mempercepat proses pengusutan kasus Koesmayadi, sdr. Yudy mengusulkan supaya dibikin time frame, mempercepat proses pengusutan ditambah dengan menginformasikan kepada masyarakat perkembangan tahapan secara berkala saya kira mencakup itu. Kalau soal pak permadi saya kira tadi kesimpulannya soal-soal pengaduan barangkali kita rumuskan prinsipnya bahwa itu supaya dibicarakan bersama dengan instansi terkait.

Menhan :

Catatan terakhir serahkan pada Dirjen Kuathan untuk mengurus pensiunan itu, semua pengaduan tentang itu mohon disampaikan kepada dephan c.q. Dirjen Kuathan.

Panglima

Termasuk saran pak Permadi tadi, jadi saya tidak ingin justru nanti yang disimpulkan DPR oleh para Purnawirawan pak, dan tidak sepenuhnya benar pengaduan itu, karena banyak juga pengaduan yang ke bapak itu juga pengaduan ke kita, jadi juga kita evaluasi, sejauh itu sesuai dengan peraturan dan kewenangan kita, kita akan selalu komunikasikan dengan para purnawirawan, terima kasih pak.

Ketua :

Ya, jadi saya kira itu memperkuat untuk kita bicarakan bersama, setiap ada pengaduan sudah tentu secara masing-masing instansi mempunyai proses dan mekanisme seleksinya untuk mengerti benar atau tidak benar.

Menhan :

Ada ungkapan barusan dana prajurit di ASABRI bukan dana ASABRI, dana prajurit.

Ketua :

Ya betul dana prajurit

